PENERAPAN *e-GOVERNMENT*

DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA CILEGON

Dewi Kurniasih

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, Jl Dipatiukur No. 112-118, Bandung, 40123, Indonesia

dekur010575@yahoo.com

Pendahuluan

Pembangunan Kesejahteraan sosial, pada hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Kita menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun letak tanggung jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Prinsip keadilan sosial di Indonesia terletak pada usaha secara bersama seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial adalah tanggung jawab pemerintah, juga masyarakat, dunia usaha dan komponen lainnya. Konsekuensinya harus terjadi saling sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha bahkan khususnya perguruan tinggi sebagai pencetak kader bangsa.

Demikian halnya dalam penanganan kemiskinan. Jika kita merujuk kembali pada persoalan penanggulangan kemiskinan, maka penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Keliru jika meletakkan tanggung jawab itu hanya pada pundak pemerintah atau hanya pada masyarakat. Pemerintah membuka tangan lebar-lebar bagi siapapun komponen bangsa untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melakukan usaha kesejahteraan sosial khususnya untuk menangani masalah sosial kemiskinan.

PERMASALAHAN

Dalam bidang kesejahteraan sosial, masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyandang masalah sosial, anak jalanan, anak terlantar, kecacatan, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya. Untuk memperjelas fokus permasalahan dalam kajian ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi masalah sosial di Kota Cilegon?
2. Bagaimana ketersediaan pengembangan e-Governmetn di bidang kesejahteraan sosial di Kota Cilegon?
3. Bagaimana pemetaan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Cilegon?

KAJIAN PUSTAKA

Analisis Kerjasama Lintas Sektor

Analisis merupakan sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Ali, 1995:37). Analisis merupakan suatu pemahaman dari suatu hal yang diperoleh melalui penyelidikan sehingga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kerjasama adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar dan sangat akrab di telinga kita. Dalam hidup ini, seseorang tidak bisa hidup tanpa bergantung pada orang lain. Setiap orang membutuhkan orang lain dan juga sebaliknya. Dasar itulah yang membuat seseorang untuk bekerjasama dengan yang lainnya.

Kerjasama menggambarkan orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan. Karena selalu mengerjakan sesuatu hal secara bersama-sama memungkinkan tujuan tidak dapat dicapai kalau bekerja sendirian (Frank and Smith, 2000:5). Kerjasama menggambarkan bentuk interaksi antara sesuatu dengan lainnya. Kerjasama adalah solusi segala hal. Kerjasama merupakan *k*unci untuk menciptakan multikulturalisme.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial adalah suatu aktivitas yang kemudian dikenal dengan istilah Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Berdasarkan literatur, konsep kesejahteraan sosial merujuk pada tiga konsepsi, yaitu 1) suatu kondisi statis atau keadaan sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial, 2) kondisi dinamis, yaitu kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis diatas; serta 3) institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan atau pelayanan sosial. Pemahaman kesejahteraan sosial pada konsepsi pertama, akan memberikan pengertian pada pembangunan kesejahteraan sosial sebagai proses perubahan terencana dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pengertian ini kemudian membawa pemahaman tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang sebangun dengan pembangunan sosial, bahkan dengan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pada akhirnya, seluruh aspek pembangunan ditujukan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan untuk segenap rakyatnya.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2005:4). Tujuan PKS adalah meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang meliputi:

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.

2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menunjang harga diri dan martabat kemanusiaan.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS biasanya dikenal dengan nama Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) yang antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat, anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan salah, anak yang diperdagangkan, Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang mengalami masalah psikososial, disfungi sosial atau ketunaan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang keluarga atau kelompok masyarakat, yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan, dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan dapat dipandang sebagai kebijakan untuk mempersiapkan manusianya, dan sekaligus menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Program-program tersebut antara lain meliputi :

1. Pengembangan data dasar dalam targeting pengentasan kemiskinan.

Salah satu kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah ketepatan dalam menentukan kelompok sasaran, yang dikenal dengan metode *targeting* (data kependudukan). Penentuan kelompok sasaran berarti pula penyediaan data atau informasi penunjang secara lengkap tentang potensi wilayah dan karakteristik penduduk miskin. Efektivitas metode ini ditentukan oleh kelengkapan informasi yang tersedia serta dukungan aparat pelaksana pengumpul dan pengguna data.

2. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program.

   Keterpaduan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan menyangkut keterpaduan program dan lokasi pembangunan. Disamping itu, program pengentasan kemiskinan akan lebih efektif jika dilaksanakan dalam satu unit yang agregatif atau berkelompok. Tetapi, tingkat agregasi dalam pelaksanaan tersebut harus sedekat mungkin dengan kelompok sasaran. Perencanaan program ini akan lebih efektif jika dikoordinasikan menjadi satu Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dari bentuk koordinasi tersebut, maka kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat UDKP atau kecamatan dapat dilakukan secara terpadu dan serentak, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Tujuannya adalah efektifitas dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, dan efisiensi dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.

3. Penyiapan dan pendampingan masyarakat

   Dalam strategi pembangunan daerah, masing-masing penanggulangan kantong-kantong kemiskinan perlu memperoleh prioritas setinggi-tingginya. Efektifitas pelaksanaan program sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksanaan program, proyek dan kegiatan dalam menjangkau kelompok sasaran. Ini berarti bahwa kesiapan masyarakat harus ditumbuhkan oleh aparat daerah. Di sinilah LSM/LPSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) bisa berperan. LSM/LPSM bukanlah menggantikan peran pemerintah sebagai motor pembangunan, tetapi bertindak sebagai penasihat, bahkan penunjang bagi program pemerintah.

4. Pengembangan perekonomian rakyat

Pendekatan yang paling tepat dalam mengentaskan kemiskinan, adalah pengembangan ekonomi rakyat melalui pendekatan kelompok, dalam bentuk usaha ekonomi bersama. Dari pengalaman, model pendekatan kebersamaan melalui usaha simpan pinjam pada umumnya, merupakan pendekatan yang efektif dan dapat dikembangkan. Usaha simpan pinjam prinsip ekonomi yang dilandasi unsur kebersamaan dan tanggung jawab moral merupakan landasan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam usaha yang mandiri.

METODE

Pendekatan Studi

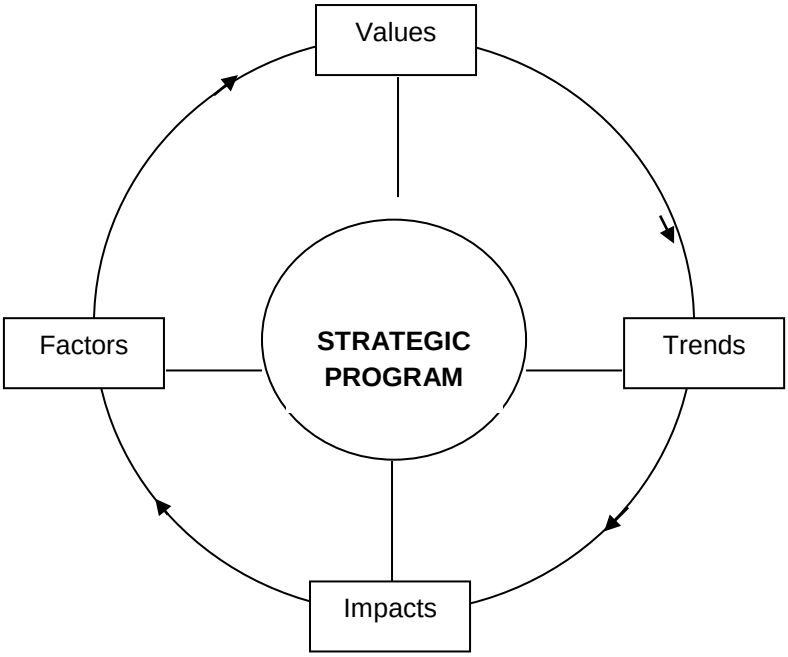
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sugiyono mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif:

> Memandang objek sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari objek itu memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah dalam beberapa variabel (Sugiyono, 2005:5).

Untuk selanjutnya pendekatan ini mengacu pada buku Charles Zastrow (2000) yang berjudul *Introduction to Social Work and Social Welfare* yaitu ada tiga perspektif dalam PKS. Perspektif tersebut adalah perspektif residual, institusional dan pengembangan. Ketiga pendekatan tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk model *welfare state* (negara kesejahteraan) yang merupakan basis pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya pemberatasan kemiskinan di negara-negara demokratis (Suharto, 2005:10).

Model Analisis Studi Kebijakan

Model analisis yang digunakan dalam kajian lintas sektor ini memerlukan parameter yang jelas untuk menentukan apakah program PKS bersifat strategis, kurang strategis atau tidak strategis. Secara konseptual, parameter untuk menentukan kerjasama lintas sektor dalam PKS dapat diringkas dalam akronim FIT-V seperti tampak pada gambar berikut:



Gambar 3.1 Parameter Program Lintas Sektor PKS

Pemahaman mengenai program yang akan dilansir sebagai kegiatan lintas sektor dalam PKS ini selain akan membantu memudahkan penentuan prioritas program PKS, juga dapat meningkatkan daya saing program PKS dibandingkan dengan program pembangunan lainnya.

Unit Analisis

Dalam studi ini, yang menjadi unit analisisnya adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang memiliki perhatian terhandap pengentasan masalah sosial di Kota Cilegon. Adapun tehnik pemilihannya dilakukan secara *purposive* (bertujuan) yaitu:

> Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu dapat diartikan bahwa informan yang kita pilih dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2005:54).

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan. Hal ini dikemukakan oleh Nasir bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir,1998:5). Sedangkan teknik pengumpulan data adalah:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan untuk informan atau nara sumber mengenai analisis kerjasama lintas sektor dalam PKS.
2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan pengamatan langsung ke instansi/lembaga/SKPD yang terkait di Kota Cilegon.
3. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mencari buku-buku pegangan yang berhubungan dengan kerjasama lintas sektor dalam PKS.

Analisa Data

Model analisis data yang sesuai dengan studi ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dalam keseluruhan. Terdapat unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kualitatif dimana terbagi menjadi:

1. Reduksi Data
   Reduksi data adalah bagian dari proses analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.
2. Sajian Data
   Sajain data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan. Sajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Penarikan Kesimpulan
   Pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah diproses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang

sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

(Sugiyono, 2005:92-99).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Sosial di Kota Cilegon

Kesejahteraan sosial merupakan kebutuhan setiap orang yang secara jelas diamanatkan di dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini penting khususnya bagi mereka yang rentan mengalami masalah sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Permasalahan mengenai PMKS (penyandang masalah kemiskinan) di Kota Cilegon untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Rekapitulasi Jumlah PMKS Tingkat Kota Cilegon

Tahun 2009

No.	JENIS PMKS	SINGKATAN	JUMLAH	SATUAN
1	Anak Balita Terlantar	ABT	**347**	Jiwa
2	Anak Terlantar	AT	**646**	Jiwa
3	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	WRSE	**326**	Jiwa
4	Lanjut Usia Terlantar	LUT	**204**	Jiwa
5	Penyandang Cacat	PACA	**122**	Jiwa
6	Keluarga Fakir Miskin	KFM	**1.193**	KK
7	Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak	RTLH	**97**	KK
8	Keluarga Rentan	KLGRTN	**134**	KK
9	Anak Nakal	AN	**4**	Jiwa

10	Anak Jalanan		AJ		**0**		Jiwa
11	Tuna Susila		TS		**12**		Jiwa
12	Gelandangan		GLDNG		**7**		Jiwa
13	Pengemis		PGMS		**31**		Jiwa
14	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan		BWBLK		**3**		Jiwa
15	Korban Tindak Kekerasan		KTK		**3**		Jiwa
16	Korban Penyalahgunaan Napza		NAPZA		**1**		Jiwa
17	Orang dengan HIV/AIDS		ODHA		**0**		Jiwa
18	Korban Bencana Alam		KBA		**0**		Jiwa
19	Korban Bencana Sosial		KBS		**22**		Jiwa
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial		PM		**1**		Jiwa
21	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		KBSP		**247**		Jiwa

Dalam rangka pemberdayaan kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS yang lain, dilakukan dengan (1) meningkatkan pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lain, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kelompok usaha bersama (KUBE); (2) meningkatkan kerja sama kemitraan pengusaha dengan KUBE dan LKM; (3) mengembangkan *Geographic Information System* (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan (4) meningkatkan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS yang lain.

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon

Penanganan masalah sosial akan merespon masalah dan kebutuhan manusia dalam masyarakat yang senantiasa berubah, meningkatkan keadilan dan hak azasi manusia serta mengubah struktur masyarakat yang menghambat pencapaian usaha dan tujuan kesejahteraan sosial. Salah satu upaya penanganan sosial adalah melalui pembangunan. Pembangunan adalah karya terstruktur yang mempunyai implikasi luas terhadap kualitas hidup manusia. Hal ini karena konstruksi pembangunan terdiri atas serangkaian aktivitas yang direncanakan untuk memajukan kondisi kehidupan manusia.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Daerah menjadikan peran Pemerintah Kota Cilegon cukup strategis dalam membantu memberikan gambaran tentang kondisi sosial di wilayahnya. Hal ini dikarenakan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cilegon dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Cilegon dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah termasuk tugas pembantuan, pengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, merancang bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, memelihara taman makam pahlawan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. PKS di Kota Cilegon ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. Sedangkan bentuk kegiatannya meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Kerjasama Lintas Sektor Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kota Cilegon

Semua sektor pembangunan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lainnya. Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan saling mempengaruhi dan berdampak terhadap perkembangan di bidang lainnya. Pemerintah Kota Cilegon dapat mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melakukan lintas sektor pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Cilegon hendaknya

memperhatikan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan.

Masyarakat Cilegon mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peran ini dapat dilakukan oleh: perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing.

Kerjasama lintas sektor dan dunia usaha dalam manajemen pembangunan/program kesejahteraan sosial dewasa ini makin difokuskan pada kemampuan mengatur, menggerakkan, mengarahkan serta memperluas kerjasama koordinatif dan kolaboratif lintas sektor dan dengan dunia usaha. Semakin luas kerjasama dibangun dan dikembangkan, maka semakin berkembang pula peluang meningkatkan jangkauan dan kualitas pembangunan/ program kesejahteraan sosial.

Sementara peran pemerintah makin memberat pada pelaksanaan oleh masyarakat, yang secara bertahap diharapkan makin sinergi dengan peran yang dilakukan terhadap pemerintah dan dunia usaha. Tujuan program ini adalah agar menguatnya kegiatan lintas sektor dan tanggung jawab sosial dunia usaha di dalam mendukung pelaksanaan UKS secara berkelanjutan berbasiskan kemitraan dan kerjasama.

Adapun yang menjadi sasaran kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Cilegon ini adalah:

1. Kalangan dunia usaha baik di daerah maupun pusat
2. Bagian unsur lintas sektor ditingkat daerah maupun pusat
3. Pelaku-pelaku masyarakat (Orsos/LSM-UKS dan lain-lain) yang potensial bekerjasama dengan dunia usaha dalam pelaksanaan PKS.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) disebabkan produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Sedangkan masalah ketuna sosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Cilegon yang banyak terjadi adalah mengenai permasalahan keluarga fakir miskin yaitu sebanyak 1.193 kepala keluarga. Hampir di setiap kecamatan yang ada di Kota Cilegon terdapat keluarga yang dikategorikan fakir miskin. Masalah ini akan terus membelit selama masalah akarnya yakni kemiskinan itu belum diatasi.

Rekomendasi

Diperlukan kerja sama lintas sektor dengan instansi-instansi yang terkait dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Cilegon terutama dalam penanganan fakir miskin yang menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang paling tinggi.

Harapan dan kenyataan hidup masyarakat merupakan titik tolak kerjasama lintas sektor sebagai awal pemecahan masalah sosial dengan karakteristik : 1) Kondisi yang dirasakan banyak orang. 2). Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan 3). Kondisi yang menuntut pemecahan, suatu kondisi di masyarakat yang memerlukan pemecahan. 4). Pemecahan masalah sosial yang dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial.

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Cilegon dan pemetaan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Cilegon :

1. Mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaan yang meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, rumah perlindungan sosial.
2. Kerjasama lintas sektor dan dunia usaha dalam manajemen pembangunan/program kesejahteraan sosial yang difokuskan pada kemampuan mengatur, menggerakkan, mengarahkan serta memperluas kerjasama koordinatif dan kolaboratif lintas sektor dan dengan dunia usaha.
3. Menguatnya kegiatan lintas sektor dan tanggung jawab sosial dunia usaha di dalam mendukung pelaksanaan UKS secara berkelanjutan berbasiskan kemitraan dan kerjasama.
4. Memperkuat komitmen lintas sektor dan dunia usaha melalui sosialisasi prinsip-prinsip kemitraan.
5. Perlu memberdayakan infrastruktur sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang sudah tumbuh dan berkembang di daerah, seperti LSM, Orsos Desa, Karang Taruna dan lain-lain yang dapat menggantikan peran PSK dan PSM yang sudah tidak ada di daerah.
6. Dalam hal melakukan usaha-usaha dalam merehabilitasi sosial para penderita narkotika sebagai berikut :
    a. Melalui tehnik pekerjaan sosial ditanamkan motivasi untuk mengatasi ketergantungannya kepada obat-obat narkotika.
    b. Mengajarkan dan melatih ketrampilan yang diperlukan para penderita agar mereka mampu kembali ke dalam lingkungan masyarakat.
    c. Secara efektif mengadakan penyaluran kembali orang-orang yang bersangkutan ke dalam penghidupan bersama.

7. Penyelenggaraan pembinaan para penderita cacat meliputi aspek rehabilitasi maupun kesejahteraan bagi para penderita cacat tubuh, cacat mental dan cacat tunanetra. Guna mencapai maksud tersebut telah dilaksanakan:
    a. Untuk penderita cacat tubuh: membangun asrama, ruang latihan kerja, kantor, serta melengkapi peralatan-peralatan rehabilitasi.
    b. Untuk penderita cacat mental: membangun asrama, ruang latihan kerja, kantor, serta perlengkapan rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi.
8. Untuk penderita cacat tunanetra: memperluas bangunan dan melengkapi peralatan rehabilitasi pada Panti Pendidikan dan Pengajaran Kegunaan Tunanetra.

Daftar Pustaka

Nasir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian.* Jakarta:Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:ALFABETA

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung:Refika Aditama.

Sobur, Alex (2002). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Semiotik, Framing*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.